



UPY
Universitas PGRI Yogyakarta

Volume 9, Nomor 1, April 2012

ISSN 1978 - 1679

AKMENIKA

Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Desain Penelitian Pengukuran Efisiensi Biaya pada Organisasi Puskesmas dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*.
Sri Widodo

Pengaruh Sanksi Pajak dan Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Ani Wakidah, Tri Siwi Nugrahani

Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Telkom Yogyakarta.
Imam Abdul Rosid, Yati Suhartini

Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan.
Dian Fiandari, Murti Sumarni

Analisis Kualitas Pelayanan untuk Membangun Kepuasan Pelanggan "Dhea Frozen Food" di Yogyakarta.
Faramita Firdausyah, Arif Sudaryana

Evaluasi Perlakuan Akuntansi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PSAK No. 45 dan Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende-Flores).
Anna Bulu, Vidya Vitta Adhivinna

**Penerbit Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Jl.PGRI I, Sonosewu No.117 Yogyakarta 55182
Telp./Fax.(0274)376808, 373198, 373098
www.ekonomi.upy.ac.id / www.upy.ac.id**

AKMENIKA

VOLUME 9

NO. 1

HALAMAN
119 - 179

YOGYAKARTA
April 2012

ISSN
1978 - 1679

Jurnal Akuntansi dan Manajemen berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Akuntansi dan Manajemen. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober.

Redaksi:**Pelindung**

Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Ekonomi UPY

Pimpinan Redaksi

Dra. Murti Sumarni, MM

Sekretaris Redaksi

Lilik Siswanta, SE, MM

Sri Widodo, SE

Anggota

Dra. Tri Siwi Nugrahani, SE, MSi.

Dra. Yati Suhartini, MA

Saptaningsih Sumarmi, SE, MM

Vidya Vitta Adhivina, SE, MSi, Akt.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekretariat Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta 55182
Telp./Fax. (0274)376808, 373198, 373098. *Homepage:* www.ekonomi.upy.ac.id *e-mail:* ekn.upy@yahoo.com

Penyunting menerima artikel hasil penelitian yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Artikel diketik diatas kertas HVS kuarto spasi ganda sebanyak 25 halaman (sudah termasuk daftar referensi), dengan format seperti pada halaman bagian terakhir jurnal ini (Ketentuan Penulisan Naskah Jurnal). Penyunting berhak mengevaluasi dan menyunting artikel yang masuk untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

MITRA BESTARI

Sebagai Peneliti Ahli Tahun 2012-2015

Semua naskah yang disumbangkan kepada Jurnal Akuntansi dan Manajemen (AKMENIKA) telah ditelaah oleh mitra bestari berikut ini:

1. Prof. Dr. Hartono, MS. (Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta).
2. Dr. P. Eko Prasetyo, MSi. (Universitas Negeri Semarang).
3. Drs. John Suprihanto, MIM. Ph.D (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta).

DAFTAR ISI

Desain Penelitian Pengukuran Efisiensi Biaya pada Organisasi Puskesmas dengan Menggunakan <i>Data Envelopment Analysis (DEA.)</i> <i>Sri Widodo</i>	119-126
Pengaruh Sanksi Pajak dan Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <i>Ani Wakidah, Tri Siwi Nugrahani</i>	127-135
Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Telkom Yogyakarta. <i>Imam Abdul Rosid, Yati Suhartini</i>	136-147
Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. <i>Dian Fiandari, Murti Sumarni</i>	148-158
Analisis Kualitas Pelayanan untuk Membangun Kepuasan Pelanggan "Dhea Frozen Food" di Yogyakarta. <i>Faramita Firdausyah, Arif Sudaryana</i>	159-166
Evaluasi Perlakuan Akuntansi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PSAK No. 45 dan Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende-Flores) <i>Anna Bulu, Vidya Vitta Adhivinna</i>	167-176
KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL	177-179

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PSAK NO. 45 DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN YANG BERLAKU PADA ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende-Flores)

Anna Bulu, Vidya Vitta Adhivinna

Universitas PGRI Yogyakarta Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu Yogyakarta

Email: aprilvitta29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengevaluasi perlakuan akuntansi dan pajak penghasilan pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan. 2) mengevaluasi penyusunan laporan keuangan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan berdasarkan PSAK no 45. 3) mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan. 4) mengevaluasi pelaksanaan perhitungan dan penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende-Flores pada bulan Mei-Juni 2011. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini: deskriptif analisis dengan membandingkan teori dengan data-data yang diperoleh berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan.

Hasil Penelitian menyimpulkan: 1) penerapan akuntansi nirlaba yang dilakukan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan no.45 dan memenuhi unsur akuntansi nirlaba; adanya sumber daya manusia yang handal, pencatatan anggaran yang membiayai aktivitas operasional yayasan, jurnal pada akhir periode dan pelaporan keuangan yayasan pada setiap akhir periode. 2) perhitungan PPh pasal 21 pada yayasan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntansi Nirlaba, PSAK no 45, PPh pasal 21 dan Undang-undang perpajakan.

Latar Belakang Masalah

Situasi Bangsa Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan ini membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidup, dan membawa perubahan besar dalam segala bidang kehidupannya, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan penderitaan hidup masyarakat dewasa ini. Situasi tersebut menyebabkan timbulnya banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial atau dengan kata lain "organisasi nirlaba."

Organisasi nirlaba atau organisasi

non profit adalah suatu organisasi yang ber-sasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba (*moneter*). Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, yayasan pendidikan, rumah sakit, sekolah negeri, dan organisasi jasa sukarelawan.

Organisasi nirlaba (*non profit*) menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. PSAK No.45 menegaskan bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber dana dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang

tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2009). Organisasi nirlaba (*non profit*) sama halnya dengan organisasi laba (*profit*) yang harus menyajikan dan memberikan informasi keuangan kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Laporan keuangan pada organisasi profit yang lengkap biasanya meliputi: (1) Laporan Neraca, (2) Laporan Laba/Rugi, (3) Laporan Perubahan Ekuitas (Munawir 2007.13). Sedangkan dalam organisasi nirlaba laporan keuangan meliputi: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Aktivitas, (3) Laporan Arus Kas. Tujuan laporan keuangan dalam organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu serta untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang. Informasi dalam laporan posisi keuangan membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai (1) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, (2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, (3) Kebutuhan pendanaan eksternal. (IAI, 2009) dan (4) Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang, (Mardiasmo, 2009).

Pihak manajemen perlu mempertanggungjawabkan sumbangan atau dana yang telah diterima dari berbagai pihak berupa laporan keuangan. Untuk pihak internal, tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui situasi keuangan yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk pihak eksternal, bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang disumbangkan telah dipergunakan dengan baik dan terlampir dalam laporan keuangan organisasi tersebut, serta untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang agar dapat dipercayai dalam pengelolaan organisasi selanjutnya. Melihat situasi tersebut, para pengelola organisasi nirlaba harus mampu memberikan laporan keuangan yang baik kepada para penyumbang agar tidak kehilangan kepercayaan dan menghentikan sumber

dana terhadap organisasi nirlaba yang dikelolanya. Namun masih banyak organisasi nirlaba yang menyajikan laporan keuangan kepada pihak internal maupun pihak eksternal sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam organisasi tersebut. Data yang disajikan hanya berupa sumber dana dan penggunaan dana. Penyajian yang demikian mengakibatkan para donatur tidak mengerti dan bahkan tidak mengetahui apakah dana yang disumbangkan digunakan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dengan mengikuti PSAK No.45 organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyediakan informasi keuangan yang paling relevan dan paling mudah dipahami oleh para penyumbang, kreditur, dan pemakai lain di luar organisasi serta mempermudah pelaporan pajak penghasilan terutang bagi organisasi nirlaba dimaksud, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU no. 17 tahun 2000. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan usaha dan penyelenggara kegiatan. (Mardiasmo, 2009)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yayasan Persekolahan Bina Wirawan adalah salah satu bentuk organisasi

nirlaba yang berkedudukan di Ende Flores, merupakan salah satu karya para suster CII dalam bidang pendidikan. Yayasan Persekolahan Bina Wirawan terus berupaya untuk meningkatkan manajemen yayasan dan sekolah-sekolah yang dikelolanya secara profesional dengan cara melengkapi sarana dan prasarana maupun mengembangkan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan jumlah pegawai, tenaga guru, serta fasilitas pendidikan yang memenuhi standar sebagai yayasan yang baik. Dengan demikian sangat mempengaruhi tingkat pendapatan gaji karyawannya. Dari penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah pokok dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah memperlakukan Akuntansi sesuai dengan PSAK no 45 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan dan penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan?

Kajian Teori

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (*moneter*). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, yayasan dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.

Ciri-ciri Organisasi Nirlaba:

- 1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan

pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

- 2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- 3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Pada organisasi nirlaba harus memutuskan alokasi sumber daya yang terbatas secara bijaksana, perencanaan strategi lebih penting dan lebih banyak memakan waktu daripada jenis usaha itu sendiri. Dimana keputusan programnya jadi lebih banyak pertimbangan pribadi (*subyektif*).

Universitas, sekolah tinggi, yayasan, dan organisasi sejenis biasanya mengetahui berapa kira-kira pendapatan sebelum tahun anggaran dijalankan. Namun organisasi tersebut tidak memiliki pilihan dalam meningkatkan pendapatannya karena organisasi tersebut tidak mungkin melakukan kegiatan pemasaran (promosi/iklan) untuk mendukung pendapatannya. Organisasi tersebut menanggung biaya sesuai dengan estimasi jumlah penjualannya sehingga diharapkan organisasi mendapatkan titik impas. Biasanya organisasi meminta unit-unit pertanggungjawaban dalam organisasi membatasi pengeluaran sesuai dengan yang telah diatur dalam anggaran. Oleh karena itu, organisasi tersebut memerlukan manajer yang mempunyai tanggungjawab pusat membatasi pengeluaran sampai ke dekat jumlah anggaran. Bisa disimpulkan alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam organisasi seperti ini adalah berkaitan dengan aktivitas keuangan organisasi yakni anggaran (baik itu pendapatan maupun pengeluaran).

Akuntansi Organisasi Nirlaba

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK (2009:45) laporan akuntansi organisasi nirlaba meliputi:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan aktivitas.
3. Laporan arus kas.
4. Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Akuntansi Organisasi Nirlaba

Menurut Ahmed Riahi – Belkaoui (2000:145) Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak beda dengan organisasi Laba. Para pengguna ini membutuhkan laporan keuangan nirlaba untuk menilai :

- a) Seberapa besar kemampuan organisasi untuk dapat menyediakan jasa.
- b) Kemampuan para pengelola organisasi untuk mengelola sumber daya.
- c) Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih.

Pertanggungjawaban pengelola mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disampaikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dalam organisasi nirlaba sama dengan peran anggaran dalam organisasi komersial. Anggaran disusun untuk perencanaan dan aktivitas yang dilakukan. Dalam organisasi nirlaba anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi, dengan demikian dilakukan pencatatan, pembentukan dan realisasi anggaran.

Menurut Baldric dan Bonni Siregar (2001:7) secara berurutan bahwa siklus akuntansi organisasi nirlaba sebagai berikut:

- a) Mencatat anggaran dalam catatan akuntansi.

- b) Mencatat transaksi yang terjadi selama periode tertentu.
- c) Membuat jurnal penutup.
- d) Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi: neraca, laporan pendapatan, belanja dan perubahan saldo dana, laporan arus kas, laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi.

Anggaran dalam organisasi nirlaba lebih bersifat formal. Anggaran disusun untuk tujuan perencanaan dan pengendalian tanpa dimaksud untuk tujuan pencatatan akuntansi.

Aspek Perpajakan untuk Yayasan

Pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan (Pasal 1 UU No. 16/2001 tentang Yayasan). Yayasan merupakan badan yang terpisah sehingga menjadi WP (Wajib Pajak) tersendiri dan wajib ber-NPWP. Dengan demikian, yayasan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya.

a. Kewajiban Perpajakan Yayasan

Yayasan mendaftarkan diri sebagai WP untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila menyerahkan BKP/JKP, menyelenggarakan pembukuan, menghitung dan memperhitungkan pajak, memotong atau memungut pajak dari penghasilan atau obyek yang wajib dipotong atau dipungut, membayar dan menyetor pajak dan melaporkan SPT masa dan tahunan.

b. Lingkup Objek Pajak Yayasan

Lingkup objek pajak yayasan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa;
2. Bunga deposito, bunga obligasi dan bunga lainnya;
3. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta

yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;

5. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

c. Penerimaan atau Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

1. (a.) bantuan atau sumbangan (dalam rangka pengembangan olahraga, promosi, infrastruktur, dan sumbangan fasilitas pendidikan); (b.) harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;" sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima." Apabila bantuan, sumbangan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

d. Pengurangan penghasilan bruto.

Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan mengurangkan :

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
2. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh

3. Subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak bergerak di bidang pendidikan.

Contoh Pengurangan Penghasilan Bruto; biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Yayasan Pendidikan, antara lain berupa :

1. Gaji / tunjangan / honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
2. Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
3. Biaya publikasi/iklan;
4. Biaya kendaraan dan penyusutan
5. Biaya kemahasiswaan dan ujian semester;
6. Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);
7. Biaya laboratorium;
8. Biaya penyelenggaraan asrama;
9. Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
10. Biaya pemeliharaan kampus;
11. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
12. Biaya penelitian dan pengembangan;
13. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
14. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
15. Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
16. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Penghitungan Pajak Penghasilan Yayasan

Penghasilan Kena Pajak Yayasan dilaporkan dalam bentuk SPT Tahunan adalah jumlah penghasilan (kecuali penghasilan yang dikenakan PPh Final) dikurangi dengan biaya yang hasilnya bisa berupa selisih lebih atau selisih negatif. Selisih lebih dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17 UU PPh). Bila menunjukkan selisih negatif,

tidak terutang PPh. Khusus yayasan di bidang pendidikan, selisih lebih yang diinvestasikan kembali dalam waktu 4 tahun tidak dikenakan pajak penghasilan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu *Kristian (2007)*

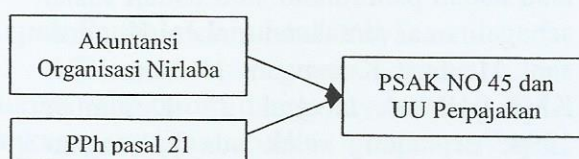
Peneliti meneliti tentang Evaluasi atas Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 45. Studi Kasus pada Yayasan Ichthus. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Permata dibawah naungan Yayasan Ichthus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK no. 45, hal tersebut ditemukan dalam tersedianya laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai perubahan terhadap aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih terikat permanen. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada suatu periode yang disajikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Catatan atas laporan keuangan telah disajikan secara sistematis dan menyediakan informasi yang tidak dijelaskan dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Ulin (2009)

Peneliti meneliti tentang Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 pada RS. Permata Bunda Purwodadi. Objek penelitiannya adalah Penghitungan PPh Karyawan Tetap (PPh) Pasal 21 pada RS. Permata Bunda Purwodadi periode penelitian 2008. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa RS. Permata Bunda Purwodadi telah melaksanakan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan no. 17 tahun 2000.

Kerangka Berpikir

Perhitungan PPh 21 yang dipelajari pada Yayasan Bina Wirawan adalah Jumlah Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun dikurangi PTKP setahun dan dikalikan Tarif Pajak yang berlaku di bagi 12 bulan. Sehingga perhitungan PPh pasal 21 pada Yayasan Bina Wirawan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kerangka berpikirnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui dan memperoleh data secara langsung dari yayasan.

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan penulis untuk meneliti dan memperoleh data pada yayasan yakni : Bulan Mei – Juni 2011.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana penulis memperoleh data penelitian yaitu: Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende – Flores.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan variabel dependen yaitu PSAK no. 45 dan UU Perpajakan sedangkan variabel independennya adalah Akuntansi Organisasi Nirlaba dan PPh Pasal 21.

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada suatu yayasan sebagai satu organisasi non profit dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diselidiki. Metode penelitian yang akan diterapkan adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang yayasan, akuntansi organisasi nirlaba dan pajak penghasilan pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan yakni

laporan keuangan dan laporan pajak periode 2008-2010. Data yang akan dianalisis lalu dibandingkan dengan teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dengan demikian kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini hanya berlaku bagi Yayasan Persekolahan Bina Wirawan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis membandingkan hasil penelitian dalam yayasan dengan teori-teori yang ada (indikator yang telah ditetapkan):

Tabel . Sosialisasi Variabel

Variabel	Indikator variabel	Skala pengukuran
Akuntansi organisasi nirlaba dan PPh pasal 21 telah diperlakukan pada yayasan sesuai PSAK no. 45 dan undang-undang perpajakan	1. Sumber daya manusia	Ordinal
	2. Siklus akuntansi yayasan:	Ordinal
	• Mencatat anggaran dalam catatan akuntansi	Ordinal
	• Mencatat transaksi	Ordinal
	• Membuat jurnal penutup	Ordinal
	• Membuat laporan keuangan	Ordinal
	3. Tujuan Pelaporan keuangan menyajikan informasi mengenai :	Ordinal
	• Jumlah, sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih	Ordinal
	• Pengaruh transaksi	Ordinal
	• Cara yayasan memperoleh dan membelanjakan kas	Ordinal
	4. PPh pasal 21 terutang:	Ordinal
	• Menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai yayasan	Ordinal
	• Mengisi dan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak badan	Ordinal

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam penerapan Akuntansi Nirlaba dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dapat dikatakan bahwa Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah menerapkan dan memperlakukan unsur-unsur akuntansi dan perpajakan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai yayasan khusus bagian keuangan dapat memahami tugasnya dengan melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang terjadi dalam aktivitas yayasan. Para pegawai dapat mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Dengan demikian pegawai yang memahami tugasnya serta trampil dalam pencatatan transaksi keuangan dapat menciptakan palaporan keuangan yayasan yang baik.

b) Penyusunan Anggaran

Yayasan Persekolahan Bina Wirawan menyusun anggaran yang berlaku selama satu tahun. Anggaran sangat berperan

dalam pelaporan keuangan yayasan karena semua penerimaan dan pengeluaran selalu mengacu pada anggaran yang dibuat oleh tim perancang anggaran. Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan sistem campuran yaitu dimulai dengan penjelasan mengenai visi dan misi yayasan kemudian dijabarkan dalam program secara garis besar, dijelaskan kepada masing-masing unit karya yang ada pada struktur organisasi yayasan. Selanjutnya masing-masing unit membuat suatu anggaran berdasarkan program kerja yang telah ditentukan. Anggaran tersebut disampaikan kepada pengurus dan pengawas yang diharapkan untuk dipelajari dan disahkan. Dengan adanya penyusunan anggaran terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dana maka dapat menunjang pelaporan keuangan yang lebih baik.

c) Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan dimulai dari diterimanya uang yang berasal dari penerimaan yayasan. Proses pembelanjaan berawal dari disetujuinya permintaan anggaran dari bidang yang membawahi aktivitas tertentu dan mengajukan kepada bendahara yayasan

untuk mengeluarkan uang dari kas yayasan. Dengan adanya pencatatan transaksi dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran uang disertai bukti yang mendukung untuk dapat menunjang pelaporan keuangan yayasan yang lebih baik. Informasi yang dicatat juga mengenai jumlah aktiva, jumlah arus kas masuk dan kas keluar, cara yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas. Dengan demikian diharapkan dapat memenuhi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

d) Pembuatan Jurnal Penutup

Penutupan perkiraan berarti mempersiapkan budget atau pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Penutupan terdiri dari penjurnalan dan pemindahbukuan ayat jurnal penutup. Penutupan transaksi akan mengembalikan nilai sisa pendapatan dan pengeluaran untuk penghitungan penerimaan dan pengeluaran periode berikutnya. Akhir tahun anggaran disusun realisasi anggaran yang menunjukkan kemampuan pengurus yayasan untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Proses akuntansi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya saldo anggaran sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi.

e) Pembuatan laporan keuangan

Yayasan Persekolahan Bina Wirawan memberikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan meliputi laporan bulanan, laporan penerimaan dan pengeluaran saldo dana dan laporan arus kas serta laporan perbandingan antara perencanaan dan realisasi. Informasi keuangan ini berguna dalam membuat keputusan atas alokasi sumber dana dan menilai pengurus dalam melaksanakan tanggung jawab atas tugasnya serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran program pada tahun berikutnya.

Informasi keuangan yang ditetapkan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, telah memenuhi tujuan kualitatif dari informasi

keuangan yang menunjang pelaporan keuangan yayasan antara lain :

- 1) Relevan: informasi yang dihasilkan adalah yang relevan dengan kebutuhan para pemakai informasi keuangan sehingga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 2) Dapat dimengerti: informasi yang dihasilkan mudah dimengerti karena disajikan secara sederhana berupa penerimaan dan pengeluaran kas.
- 3) Daya uji: informasi yang dihasilkan dari segi validitas dengan cukup baik. Dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dalam bidang keuangan.
- 4) Netral: informasi yang dihasilkan dapat diterima dan dimengerti oleh pihak yang membutuhkan informasi.
- 5) Tepat waktu: informasi yang dihasilkan dapat diperoleh pada waktu yang diperlukan dan tepat untuk perencanaan program yang lebih lanjut.
- 6) Daya banding: informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan yayasan lain untuk perbaikan.
- 7) Lengkap: informasi yang dihasilkan lengkap, meliputi data-data keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan demikian informasi keuangan yang dihasilkan menunjang efektivitas pelaporan keuangan yayasan.

Unsur-unsur pelaporan keuangan yang dijalankan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan pada tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah; (a) Jumlah anggaran yang disusun yayasan untuk tahun 2008 menandai aktivitas operasional yayasan sebesar Rp. 955.500.000,- yang terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp. 366.000.000,- dan program sebesar Rp. 589.500.000,-. Penggunaan untuk membiayai pengeluaran yayasan sebesar Rp. 929.711.093,-; (b) Jumlah anggaran yang disusun yayasan untuk tahun 2009 menandai aktivitas operasional yayasan sebesar Rp. 1.435.000.000,- yang terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp.

450.000.000,- dan program sebesar Rp. 985.000.000,-. Penggunaan untuk membiayai pengeluaran yayasan sebesar Rp. 1.430.957.916,-; (c) Jumlah anggaran yang disusun yayasan untuk tahun 2010 menandai aktivitas operasional yayasan sebesar Rp.1.650.000.000,- yang terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp. 550.000.000,- dan program sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Penggunaan untuk membiayai pengeluaran yayasan sebesar Rp. 1.534.813.152,-

- 2) Pengaruh transaksi yang dapat menambah atau mengurangi jumlah aktiva adalah merupakan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan yayasan. Seluruh transaksi dicatat oleh bendahara disertai bukti-bukti yang mendukung sehingga pelaporan keuangan yayasan menjadi lebih baik.
- 3) Cara yayasan memperoleh dan membelanjakan kas: Sumber kas yang diperoleh Yayasan Bina Wirawan adalah semata dari unit-unit karya baik berupa sumbangan wajib maupun akhir tahun yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasional yayasan. Sumber dan penggunaan uang yang diperoleh oleh yayasan selalu dilaporkan yayasan dalam bentuk laporan keuangan.
- f) Perhitungan PPh pasal 21.

Perhitungan PPh 21 yang diperlakukan pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan adalah Jumlah Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun dikurangi PTKP setahun dan dikalikan Tarif Pajak yang berlaku di bagi 12 bulan. Penghasilan Neto yang diterima pegawai yayasan kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga PPh pasal 21 terutang untuk Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nihil. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan pada tahun 2008 jumlah pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua sebanyak 139 orang dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 1.344.910.032,- sedangkan pegawai tidak tetap atau penerima honorarium dan penghasilan lainnya seba-

nyak 224 orang dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 717.972.000,- sehingga jumlah pegawai seluruhnya 363 orang dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 2.062.882.032,-
g) Penyampaian SPT tahunan

Berdasarkan penelitian penulis, Yayasan Persekolahan Bina Wirawan selaku wajib pajak badan setelah pemotongan pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar yaitu Kantor Penyuluhan Pajak Ende Flores.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi Organisasi Nirlaba yang dilakukan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan no. 45 dan memenuhi unsur-unsur akuntansi nirlaba secara memadai yakni:
 - a) Adanya sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk melakukan pencatatan terhadap segala transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam aktivitas yayasan.
 - b) Adanya pencatatan anggaran yang telah disusun yayasan dengan tidak dibatasi penggunaan untuk membiayai aktivitas operasional yayasan.
 - c) Adanya jurnal pada akhir periode akuntansi.
 - d) Adanya laporan keuangan yang terdiri dari: laporan bulanan, laporan pendapatan, laporan arus kas dan laporan perbandingan anggaran dan realisasi pada setiap akhir periode akuntansi.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penulis menemukan dalam perhitun-

PPh pasal 21 pada yayasan nihil. Ini diketahui karena penghasilan bruto pegawai yayasan kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Meskipun perhitungan PPh pasal 21 yayasan nihil, namun yayasan sebagai Wajib Pajak tetap mengisi SPT dan menyampaikan ke kantor pajak pada akhir tahun pajak.

Daftar Pustaka

- Amica. repository 2007. "Analisis Pemberlakuan Pajak Penghasilan terhadap Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan." Tesis Akuntansi. USU.
- Baridwan Zaki. 2000. *Intermediate Accounting Edisi 7*, Yogyakarta: BPFE.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal Hasan. 2010. *Analisis data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta.
- Kristian Yoel. 2007. *Evaluasi atas Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 45*. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Program Sarjana STIE KESATUAN Bogor.
- Mariati Ulin Deppi. 2009. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mamdu M, Hanafi, Abdul Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamdu M, Hanafi, Abdul Halim. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Empat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Murti Sumarni, Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Primadita Fitriandi dkk. 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riahi, Ahmed, Belkaoui. 2000. *Teori akuntansi*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 16 tahun 2009, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 tahun 2009, tentang *Pajak Penghasilan*.
- Sugijanto, Robert Gunardi H, Sonny Loho. *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi non Laba*.
- Siregar, Baldic dan Benni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Sadjiarto Arja. 2000. *Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21*: Jurnal akuntansi dan Keuangan, Vol.2, No. 1, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index...>
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.